



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
**UNIT KERJA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH  
**SUB UNIT KERJA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YULIANTO SUDRAJAT
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 629210

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.099.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/170 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 680.000.000
2. Tanah Seluas 126 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 189.000.000
3. Tanah Seluas 115 m2 di SUKOHARJO, WARISAN Rp. 230.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 22.000.000

1. MOTOR, HONDA SKUTIC Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SPORT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 5.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 294.366.560**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.420.366.560

**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.420.366.560

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.